



Aktualisasi Arbeiter Samariter Bund dalam Bidang Pengurangan Risiko Bencana Inklusif di Provinsi Jawa Tengah

Muhammad Jaffar Rachmaditya, Hermini Susiatiningsih, Muhammad Faizal Alfian

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Website:

<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Central Java is one of the provinces that occupies the first position which is said to be a disaster laboratory in Indonesia. However, the Central Java BPBD (Regional Disaster Management Agency) is still lacking in capacity building in the field of inclusive disaster management. Therefore, the Central Java Government cooperates with an INGO, namely ASB (Arbeiter-Samariter-Bund). The reason is that one of ASB's focuses is inclusive disaster risk reduction. Both nationally and internationally, the participation of persons with disabilities is seen as the key in increasing inclusive disaster management capacity. Based on these problems, it is interesting to study the role of ASB in including DRR in order to increase the capacity of the Central Java BPBD and the participation of persons with disabilities. The purpose of this study is to analyze the role of INGOs in capacity building through international collaboration with local governments in the field of inclusive disaster risk reduction. This study uses 3 concepts as an analytical tool, namely International Cooperation, inclusive Disaster Risk Reduction, and Capacity in Disaster Risk Reduction. The author uses qualitative research methods with analytical descriptive type. The results of this study indicate that ASB's role in providing insight creates a positive impact in the field of inclusive disaster risk reduction for both persons with disabilities and related institutions, which changes conditions that were initially vulnerable to capacity.

Keywords: *Arbeiter-Samariter-Bund, disaster, Central Java, inclusive, capacity, persons with disabilities.*

PENDAHULUAN

Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah tingkat kejadian bencana alam atau sosial yang tinggi. Provinsi Jawa Tengah menempati posisi pertama dan dikatakan sebagai “laboratorium bencana” karena memiliki beragam kebencanaan. Menurut BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Jawa Tengah menjadi salah satu Provinsi yang paling banyak dilanda bencana periode tahun 2016-2020 sebanyak 3.693 kejadian dan menempati posisi pertama dalam bencana alam (Ayu Rizaty,

2021). Kesadaran Pengurangan Risiko Bencana (PRB) telah berkembang secara global, melihat Indonesia memiliki kaitan dengan keadaan darurat dan bencana (Pertiwi et al., 2020:1). Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian internasional yang tidak mengikat yakni *Sendai Framework Action (SFA) 2015-2030* dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Internasional tahun 2006 yang telah diterapkan Perka BNPB No.14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana dan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Provinsi Jawa Tengah memiliki sebuah badan atau lembaga dengan fokus penanggulangan bencana yang dinamakan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jawa Tengah. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Retno Widiastutik, terdapat permasalahan dalam mengimplementasikan PRB inklusif pada tahun 2015-2016. Sebab, kurangnya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh terkait PRB yang inklusif kepada masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas, wanita, serta lainnya yang dapat menimbulkan korban jiwa akibat bencana alam. Tentunya, terdapat beberapa hambatan para penyandang disabilitas apabila dihadapi dengan bencana alam. Dalam merespon hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki otonomi daerah untuk melakukan kerjasama guna meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas dalam PRB. Salah satu kerjasama tersebut ialah kerjasama internasional antara BPBD Jawa Tengah dengan INGO yakni ASB (*Arbeiter Samariter Bund*). Secara singkat, ASB merupakan INGO berbasis bantuan kemanusiaan inklusif yang berasal dari Jerman dan telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2006. Salah satu fokus dalam ASB yakni mendukung segala usaha pemerintah baik daerah maupun pusat dalam membangun ketahanan, peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat melalui program PRB yang inklusif. Sebagai salah satu pendiri DiDRRN (*Disability-inclusive Disaster Risk Reduction Network*), ASB berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas dalam PRB inklusif serta mengimplementasikan nilai aksi prioritas yang terdapat di SFA (ASB, 2020). Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan mengenai bagaimana peran ASB sebagai INGO memberikan *insight* dan inklusifitas dalam peningkatan kapasitas di bidang pengurangan risiko bencana inklusif melalui kerjasama dengan *sub-government*. Dampak dari peran yang diberikan oleh INGO dapat memberi manfaat baik bagi penyandang disabilitas maupun lembaga terkait, sehingga kondisi yang sebelumnya rentan dapat menjadi berkapasitas.

KERANGKA KONSEP

Tulisan ini dibuat dengan menggunakan beberapa sumber bacaan rujukan. Beberapa sumber tersebut digunakan untuk mendapat informasi yang komprehensif. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Farabi & Susiatiningsih berjudul “Communication Strategies of DFTW (Domes for The World) in Post-Earthquake Reconstruction and Rehabilitation in Yogyakarta, Indonesia” menjelaskan bahwa kerjasama antara INGO, NGO, dan pemerintah daerah terkait bantuan kemanusiaan dengan menggunakan konsep strategi komunikasi yang menghasilkan rumah kubah *Monolithic Ecoshells* sebagai model bangunan yang tahan bencana bagi para korban pasca gempa di Yogyakarta (Farabi & Susiatiningsih, 2016). Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Santoso et al berjudul “Disabilitas dan Bencana (Studi tentang Agenda Setting Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia)” (Santoso et al., 2013) dan jurnal

yang ditulis oleh Rizki et al berjudul “Kapasitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami” (Rizki et al., 2020) yang menjelaskan analisis kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai dalam melaksanakan penanggulangan bencana masih belum optimal karena terdapat beberapa program kebencanaan yang kurang optimal serta faktor lain yang mempengaruhi.

Konsep kerjasama internasional yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 pakar dan telah disesuaikan sesuai kebutuhan penelitian. Pertama, Holsti (1988:652-653) mengatakan bahwa kerjasama internasional terdapat harapan antara dua atau lebih terkait sebuah tujuan yang saling bertemu dan menghasilkan sesuatu serta dipenuhi oleh semua aktor sekaligus, adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dapat membantu negara lain dalam mencapai kepentingannya, adanya aturan resmi dan tidak resmi terkait transaksi pada masa depan yang dilakukan agar dapat melaksanakan suatu persetujuan, serta adanya transaksi antar negara untuk memenuhi suatu kepentingan. Kedua, J.C. Johari (dalam Rudy, 2016:71) mengatakan bahwa cakupan lingkup hubungan internasional dapat dikatakan luas yaitu mempelajari berbagai hubungan atau korelasi, baik antar negara maupun asosiasi, organisasi non-pemerintah, dan hubungan yang dari yang bersifat politik sampai non-politik seperti ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan hidup, dan bantuan kemanusiaan seperti pengurangan resiko bencana. Ketiga, MD & Anwari (2002: 183-184) memberikan penjelasan hubungan kerjasama antara pemerintah dengan NGO (*Non-Governmental Organization*) maupun INGO yang terbagi menjadi 2 bentuk: (1) Hubungan yang bersifat *collaboration/cooperation*, hubungan ini pada dasarnya adalah hubungan yang saling menguntungkan sesama pihak. Dimana pemerintah menganggap bahwa bekerjasama dengan NGO merupakan suatu keuntungan untuk kepentingan nasional. NGO dan pemerintah memiliki posisi yang sejajar. Perwujudan kerjasama dalam hubungan ini dapat berupa pelatihan, sosialisasi, seminar, kegiatan lain yang bersifat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, (2) Hubungan yang bersifat *containment/dissolution*, hubungan ini merupakan hubungan yang dianggap sebagai sebuah tantangan. Pemerintah melihat NGO merupakan individu yang dianggap sebagai ancaman dalam pergerakannya, maka pemerintah mengambil tindakan bahwa NGO tersebut perlu adanya aksi pengawasan dan penekanan karena dapat menimbulkan kerugian di kalangan masyarakat. Wujud dari hubungan ini dapat berupa NGO yang membawa aspirasi masyarakat dan melakukan pertentangan kepada pemerintah dengan landasan membawa kepentingan masyarakat yang perlu ditegakkan hak-haknya. Dasar pemikiran tersebut dapat digunakan atau termasuk dari bentuk NGO di level atau dalam skop internasional, yang disebut dengan INGO.

Konsep pengurangan risiko bencana inklusif menurut Andriani (dalam Santoso et al., 2013:2025) kelompok rentan bencana tersebut adalah penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, perempuan, dan anak-anak. PRB inklusif lahir dari peristiwa dimana penyandang disabilitas yang menerima dampak bencana tidak sesuai dengan kapasitasnya. Kepentingannya sering diabaikan dan tidak terpenuhinya hak asasi manusia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa kegiatan dalam PRB inklusif bagi penyandang disabilitas, yakni: Pertama, situasi sebelum bencana. mencakup beberapa upaya dan proses kesiapsiagaan sebelum terjadinya bencana dengan mengikutsertakan penyandang disabilitas. Kedua, situasi saat bencana. Adanya aktualisasi saat terjadi bencana seperti melakukan evakuasi bagi penyandang disabilitas, menampung di pengungsian, membawa korban ke rumah sakit, melakukan pendataan, serta memberikan

terapi untuk mengurangi rasa trauma. Ketiga, *early recovery*. Terdapat beberapa kegiatan seperti melibatkan diri secara aktif dalam posko pemberian layanan dalam bencana serta memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas untuk menyelamatkan diri sendiri. Keempat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Melaksanakan penilaian kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonsiliasi dalam bidang ekonomi dan sarana prasarana, melakukan konseling bagi penyandang disabilitas untuk meminimalisir trauma, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat disabilitas.

Terakhir, konsep kapasitas dalam pengurangan risiko bencana menggabungkan 3 pakar ahli yang disesuaikan dalam penelitian ini. Annisa & Setyowati (2019: 86) mengatakan bahwa Kapasitas dalam konsep PRB dianalisis sebagai hubungan kekuatan dari macam sumber daya tersebut oleh beragam kelompok berisiko dan keseluruhan sistem maupun struktur masyarakat yang dapat meningkatkan atau menurunkan kapasitas dalam menghadapi ancaman. Peningkatan kapasitas menurut ACBF (*African Capacity Building Foundation*) (dalam Fauzi, 2016:65) merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat dalam menganalisa lingkungannya; mengidentifikasi masalah, kebutuhan, isu, serta peluang; kemudian memformulasikan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam *Capacity Building*. Menurut Warsito (dalam Dwiastari, 2017:4) terdapat beberapa faktor, diantara lain: *Pertama*, komitmen bersama. Merupakan dasaran utama yang dikembangkan secara berkelanjutan dan dipelihara seara baik, karena sebagai dasar dala melakukan proses keiatan yang akan dilkaukan oleh suatu organisasi serta komponen yang berada di dalamnya. *Kedua*, kepemimpinan. Dalam hal ini, faktor kepemimpinan memiliki peran untuk menjadi tonggak inisiasi untuk menyukseskan program dalam pembangunan kapasitas baik secara individu maupun kelembagaan sebuah organisasi. *Ketiga*, reformasi peraturan. Merupakan peraturan yang disusun dalam sebuah organisasi yang berupaya mendukung agar pembangunan kapasitas agar dapat dilaksanakan secara konsisten. *Keempat*, reformasi kelembagaan. Pada dasarnya reformasi ini menunjuk pada adanya hubungan budaya kerja untuk mendukung pengembangan kapasitas. Seperti menciptakan hubungan kerja yang baik antara karyawan dengan karyawan lainnya serta atasan. *Kelima*, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk pengembangan kapasitas. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan informasi dari berbagai studi literatur berbagai macam jenis dokumen, seperti koran, majalah, jurnal, artikel, buku, dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan jenis kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan solusi berbasis data terhadap masalah saat ini dengan menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data (Narbuko & Achmadi, 2015: 44). Jangkauan penelitian ini dilakukan sejak tahun 2015 pada saat dilakukan kerjasama hingga tahun 2018. Subjek yang akan diteliti yakni dengan melakukan wawancara individu kepada pihak yang bersangkutan seperti penyandang disabilitas, staf BPBD Jawa Tengah, dan staff ASB dalam kerjasama untuk peningkatan kapasitas dalam bidang PRB inklusif di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif

kongruen. Menurut George & Bennett (dalam Rosyidin, 2019:61) metode kongruen adalah dengan mencocokkan antara konsep dan data. Penulis berlandaskan konsep yang digunakan kemudian menguji konsep tersebut dalam mengungkapkan atau memprediksi dalam kasus tertentu.

PEMBAHASAN

Data dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemungkinan sebesar empat kali menjadi korban saat terjadinya bencana dibandingkan dengan populasi umum. WHO dan Bank Dunia juga mencatat bahwa salah satu faktor besar seperti bencana alam merupakan latar belakang meningkatnya jumlah penyandang disabilitas di dunia, termasuk salah satunya di negara Indonesia (Pertiwi et al., 2019: 2). Apabila penyandang disabilitas hanya dirumahkan saja karena stigma tersebut, alhasil akan banyak para penyandang disabilitas tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana sikap preventif ketika peristiwa bencana datang menimpa wilayah tersebut, serta kurang menyadari bahwa mereka sebenarnya memiliki peran penting yang dapat berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana (Johnson, 2017). WHO dalam *World Report on Disability* mengatakan bahwa para penyandang disabilitas perlu diberikan kesempatan untuk berkecimpung dan berpartisipasi dalam semua layanan seperti desain, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program bantuan yang ditujukan untuk masyarakat umum. Pada dasarnya, penyandang disabilitas tidak boleh hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor dalam respons kemanusiaan, khususnya dalam bidang pengurangan risiko bencana (PAHO, 2013). Potensi yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam permasalahan pengurangan risiko bencana sangat diperlukan untuk bekerjasama dengan pemerintah. Sebab, Nakaga & Shaw (2004) (dalam Priestley & MA, 2008: 32) mengatakan bahwa masyarakat dengan tingkat modal sosial dan partisipasi yang lebih tinggi membuat pemulihan yang lebih sukses dan cepat. Mengingat bahwa Indonesia telah melakukan ratifikasi pada perjanjian internasional, tentunya perlu direalisasikan guna meminimalisir dampak negatif dari bencana. Dalam penelitian ini analisis terbagi menjadi 3 bagian yakni analisis kerjasama ASB dengan BPBD Jawa Tengah, analisis peningkatan kapasitas dan partisipasi penyandang disabilitas, serta analisis peningkatan kapasitas BPBD Jawa Tengah dalam pengurangan risiko bencana inklusif.

Analisis Kerjasama ASB dengan BPBD Jawa Tengah

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari lapangan, wawancara yang dilakukan dengan berbagai sumber dari BPBD seperti Bapak Darsono, Bapak Armin, dan Bapak Adi memiliki pandangan yang sama di mana BPBD Provinsi Jawa Tengah memiliki permasalahan dalam pengimplementasian inklusif yang tergolong lemah dan kurangnya peningkatan kapasitas dan pengimplementasian PRB inklusif kepada masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas. Akibatnya dapat berdampak negatif bagi penyandang disabilitas dalam mengakses manajemen bencana karena kurangnya aksesibilitas informasi dan partisipasi terkait PRB inklusif. BPBD Jawa Tengah merupakan badan yang mengatasi terkait isu kebencanaan dan berbagai faktor lainnya terkait bencana di Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengatasi isu tersebut, dalam hal ini BPBD melakukan kerjasama dengan INGO yakni ASB, dikarenakan ASB merupakan INGO berbasis bantuan kemanusiaan inklusif dengan salah satu fokus pengurangan risiko bencana inklusif. ASB telah memiliki

berbagai pengalaman seperti memiliki 16 cabang di negara bagian, memberikan pendidikan dan pelatihan dengan mengarusutamakan inklusi, dan membantu negara-negara yang terdampak akibat bencana alam, salah satunya adalah Indonesia (ASB, 2020). Kerjasama ini dilandasi oleh MoU (*Memorandum of Understanding*) dan menghasilkan beberapa program kegiatan serta aktualisasi guna menunjang peningkatan kapasitas baik bagi BPBD Jawa Tengah maupun penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Tengah. ASB. Hal ini sesuai dengan konsep kerjasama internasional yang dikatakan oleh Holsti (1988: 652-653) yakni adanya terjadinya kesepakatan antara dua aktor atau lebih terkait sebuah kepentingan, nilai, atau sebuah tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, diwujudkan, atau dipenuhi oleh semua aktor sekaligus. Kerjasama tersebut juga senada dengan konsep yang dikatakan oleh J.C. Johari (dalam Rudy, 2016: 71) bahwa berkembangnya globalisasi mengakibatkan kerjasama internasional yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor dengan hubungan yang bersifat politik hingga non-politik. Pada penelitian ini mengambil hubungan kerjasama internasional lebih condong menjelaskan peran ASB dalam melakukan kerjasama dengan BPBD Jawa Tengah di bidang Pengurangan Risiko Bencana inklusif untuk meningkatkan kapasitas BPBD Jawa Tengah dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana inklusif.

Berdasarkan konsep MD & Anwar (2002: 183-184) penelitian ini menunjukkan kerjasama yang bersifat *collaboration/cooperation*. Data dari lapangan yang diperoleh menunjukkan bahwa kerjasama antara BPBD dan ASB menciptakan sebuah program yang bernama TATTs (*Technical Assistance and Training Teams*). Program ini memiliki dua tujuan yakni membangun kapasitas BPBD agar dapat memberikan layanan, memimpin, mengkoordinasi dalam bidang pengurangan bencana inklusif saat situasi sebelum bencana hingga pasca bencana. Kedua, mewujudkan penyelenggaraan dan pelatihan teknis dalam pengurangan risiko bencana inklusif dengan mengikutsertakan penyandang disabilitas untuk ikut andil dalam program kegiatan. Program ini dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, seminar dan kegiatan dengan tujuan untuk *transfer knowledge* atau transfer pengetahuan dengan mengusung prinsip “tidak meninggalkan siapapun” serta meningkatkan kapasitas para penyandang disabilitas dalam bidang pengurangan risiko bencana.

Dalam program kegiatan ini, ASB menggunakan sebuah pendekatan yang dinamakan *twin-track approach*. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memerlukan tindakan khusus bagi penyandang disabilitas dalam hubungannya dengan inklusi arus utama. Tujuan dari pendekatan ini berfungsi untuk memenuhi kesetaraan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan program, terutama dalam konteks peningkatan kapasitas kelembagaan BPBD dalam memberikan layanan PRB yang inklusif (Banyaneer, 2012: 5). Berdasarkan data lapangan yang diambil melalui wawancara dengan Ary Ananta, mengatakan bahwa *twin-track approach* yang dilakukan ini memiliki dua tahap. Pada tahap yang pertama, yakni melakukan kegiatan khusus yang berisikan dengan pendidikan dan pelatihan kepada penyandang disabilitas terpilih dengan tujuan agar mereka menjadi fasilitator dan dapat berkontribusi pada penanggulangan bencana yang inklusif. Tahap kedua, para penyandang disabilitas terpilih yang sudah melaksanakan pendidikan dan pelatihan khusus tersebut menjadi fasilitator termasuk sumber daya pendukung untuk diarahkan terjun ke lapangan guna melakukan praktik-pratik pengurangan risiko bencana yang inklusif, khususnya dalam tindakan pencegahan. Baik OPDis dan penyandang

disabilitas memperoleh pengembangan kapasitas kemudian menyebarkan dan menerapkan informasi tentang PRB inklusif dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan lain.

Menurut Ary, kerjasama ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas di bidang PRB inklusif pada dua pihak yakni para pejabat BPBD Jawa Tengah dan para penyandang disabilitas yang terpilih. Ary mengatakan bahwa poros utama adalah BPBD Jawa Tengah, kemudian baru penyandang disabilitas. Karena BPBD Provinsi sebagai wadah dan sarana dalam mewujudkan PRB inklusif, kemudian penyandang disabilitas dalam hal ini sebagai fasilitator, partisipasi, serta melengkapi kekurangan yang belum dapat diatasi oleh BPBD. Apabila salah satu tersebut tidak dapat memenuhi kapasitas, maka peningkatan kapasitas di bidang PRB inklusif tidak dapat diwujudkan sesuai dengan harapan bersama. Maka dari itu, kedua subjek tersebut sangat berperan penting untuk melakukan kolaborasi dan sinergitas. Tentunya kerjasama ini menimbulkan dampak peningkatan kapasitas antara ASB dengan BPBD Jawa Tengah dan penyandang disabilitas yang terpilih.

Peran ASB dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Inklusif di Provinsi Jawa Tengah

Telah dijelaskan sebelumnya, negara Indonesia telah turut campur tangan untuk meratifikasi SDGs 2015-2030, Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 tentang pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana, dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Internasional tahun 2006. Hal tersebut kemudian disahkan dalam Perka BNPB No.14 tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana, kemudian diturunkan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah yakni Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Atas dasar ikut andil dalam ratifikasi perjanjian internasional dan implementasi pada Undang-Undang negara, tentunya hal tersebut perlu direalisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat negara Indonesia demi mewujudkan kepentingan nasionalnya serta meningkatkan kapasitas dan meminimalisir dampak negatif pada bidang pengurangan risiko bencana, khususnya masyarakat pada wilayah Provinsi Jawa Tengah agar tidak hanya menjadi sebuah wacana saja. Pada sub-bab ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis peran ASB dalam kerjasama dengan BPBD Jawa Tengah dan penyandang disabilitas di bidang PRB inklusif dan analisis peran ASB dalam meningkatkan kapasitas serta partisipasi penyandang disabilitas dan BPBD Jawa Tengah dalam bidang PRB inklusif.

Analisis Peran ASB dalam Meningkatkan Kapasitas Serta Partisipasi Penyandang Disabilitas dan BPBD Jawa Tengah dalam bidang PRB Inklusif

Peningkatan kapasitas berkontribusi terhadap peningkatan inklusi disabilitas di sejumlah tingkatan yang didorong oleh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Peningkatan kapasitas dalam bidang PBR inklusif dirancang secara khusus untuk meningkatkan partisipasi dan melindungi hak kelompok rentan bencana. Andriani (dalam Santoso et al., 2013: 2025) mengatakan bahwa beberapa kelompok rentan bencana tersebut ialah penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, perempuan, dan anak-anak. Peningkatan kapasitas secara eksplisit tercantum dalam Peraturan Kepala BNPB No. 14 tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Terdapat pasal dalam peraturan tersebut yakni Pasal 8 yang

mengatakan bahwa kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu diberikan pengembangan kapasitas dan terlibat dalam pelatihan bencana. Pasal 4 juga mengatakan bahwa perlunya terbentuk badan koordinasi, Unit Layanan Disabilitas baik di dalam penanggulangan bencana nasional maupun lokal. Beberapa peraturan lain juga mengatur bahwa penyandang disabilitas secara eksplisit berhak atas partisipasi yang lebih luas dalam perencanaan dan pelaksanaan semua program penanggulangan bencana. Namun, beberapa hal tersebut belum terealisasi sebelum kerjasama dalam bidang PRB inklusif antara ASB dengan BPBD Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan para penyandang disabilitas masih dianggap sebagai objek amal serta stigma negatif.

Kapasitas yang merupakan sebuah anugerah mutlak dalam upaya penanggulangan bencana. Dalam perspektif ini, meninjau, mengakui, serta melibatkan partisipasi para penyandang disabilitas sebagai bagian dari komponen kapasitas yang beragam tersebut merupakan salah satu langkah yang progresif di bidang penanggulangan bencana khususnya dalam hal pencegahan atau preventif. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh ACBF bedanya (dalam Fauzi, 2016:65) bahwa peningkatan kapasitas merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, komunitas atau masyarakat dalam menganalisa lingkungan serta kebutuhan kemudian memformulasikan dan memanfaatkan peluang yang ada. ASB dan BPBD Jawa Tengah melakukan beberapa proses kegiatan atau upaya untuk mendukung pengembangan kapasitas dalam Pengurangan Risiko Bencana inklusif dengan dasar yang mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030. Kemudian kegiatan ini terbagi menjadi dua bagian, pertama yakni program kegiatan pengembangan kapasitas PRB inklusif untuk OPDis (Organisasi Penyandang Disabilitas) dan kedua program kegiatan pengembangan kapasitas untuk BPBD Jawa Tengah yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Program Kegiatan Pengembangan Kapasitas PRB Inklusif untuk Penyandang Disabilitas

ASB melakukan beberapa program kegiatan yang mencakup mengenai pelatihan, pendampingan, pengembangan, dan dukungan teknis dengan mengarusutamakan inklusi dengan pelaksanaan jangka waktu tahun 2015 hingga 2018 (ASB, 2018). Kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh ASB kepada para penyandang disabilitas berlandaskan dengan nilai-nilai dasar *Sendai Framework Action 2015-2030* untuk memberikan pelatihan dan sesi fasilitasi yang inklusif serta dapat diakses oleh semua pihak termasuk para penyandang disabilitas. Saat para penyandang disabilitas yang terpilih mengikuti program kegiatan dan pelatihan, mereka juga akan berbagi informasi yang diperoleh dalam organisasi mereka. Para peserta penyandang disabilitas yang terpilih mencatat bahwa sangat penting untuk menyadarkan para rekan-rekan mereka untuk lebih sadar dan siap menghadapi keadaan darurat terkait bencana alam. Kegiatan ini melahirkan dua tahap, pertama yakni melakukan kegiatan khusus yang berisikan dengan pendidikan dan pelatihan kepada penyandang disabilitas terpilih dengan tujuan agar mereka menjadi fasilitator dan dapat berkontribusi pada penanggulangan bencana yang inklusif. Tahap kedua, para penyandang disabilitas terpilih yang sudah melaksanakan pendidikan dan pelatihan khusus tersebut menjadi fasilitator termasuk sumber daya pendukung untuk diarahkan terjun ke lapangan guna mengimplementasikan praktik-pratik pengurangan risiko bencana yang inklusif, khususnya dalam tindakan pencegahan. Baik OPDis dan

penyandang disabilitas memperoleh pengembangan kapasitas kemudian menyebarkan dan menerapkan informasi tentang PRB inklusif dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan lain. Beberapa kegiatan dan praktik yang telah dilakukan ASB kepada penyandang disabilitas diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas untuk menjadi sumber daya pendukung kepada BPBD Jawa Tengah untuk menyebarkan informasi dan melakukan berbagai kegiatan serta program pengurangan risiko bencana inklusif kedepannya.

2) Program Kegiatan Pengembangan Kapasitas PRB Inklusif untuk BPBD Jawa Tengah

Program kegiatan yang dilakukan antara ASB dengan BPBD Jawa Tengah dirancang untuk meningkatkan kesadaran bagi BPBD untuk mengerti lebih dalam tentang inklusi serta meningkatkan kapasitas mereka untuk mengintegrasikan pertimbangan inklusi dalam kebijakan, perencanaan, pemantauan PRB, dan sinkronisasi dengan para penyandang disabilitas terkait PRB inklusif. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai serangkaian pendidikan dan pelatihan bagi para penyandang disabilitas dalam PRB inklusif. Menanggapi hal tersebut, ASB turut menyertakan penyandang disabilitas yang terpilih dalam program kegiatan untuk ikut aktif dalam berdiskusi dengan BPBD. Karena BPBD merupakan pakar dari PRB tetapi baru dalam hal inklusi, sedangkan para penyandang disabilitas yang sudah terlatih mereka mengerti terkait inklusi disabilitas tetapi baru dalam PRB. Hal ini dapat meningkatkan peluang pertukaran pengetahuan serta pembentukan pemahaman bersama mengenai PRB inklusif antara dua pemangku kepentingan utama. Beberapa program kegiatan tersebut memiliki kesamaan dengan program pelatihan yang dilakukan antara ASB dengan penyandang disabilitas. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan yakni melakukan pengembangan kapasitas lembaga dan dukungan teknis terkait pengurangan risiko bencana inklusif dengan tujuan menyiapkan BPBD sebagai pondasi utama dan penyandang disabilitas sebagai sumber daya pendukung bagi BPBD Jawa Tengah (ASB, 2018).

Aktualisasi Penyandang Disabilitas dan BPBD Jawa Tengah dari Peran ASB dalam Pengembangan Kapasitas di Bidang PRB Inklusif

1) Penyandang Disabilitas

Para penyandang disabilitas memiliki hak mereka dalam penanggulangan bencana, mengetahui tujuan mereka dalam PRB inklusif. Kegiatan pendidikan dan pelatihan di atas yang dilakukan antara ASB dengan BPBD Jawa Tengah dan OPDis termasuk penyandang disabilitas merupakan langkah yang progresif dalam mendukung kelompok rentan dan meningkatkan kapasitas dalam bidang PRB yang inklusif. Selaras dengan konsep yang dikemukakan oleh Andriani (dalam Santoso et al., 2013:2035), terdapat 4 kegiatan dalam PRB inklusif bagi penyandang disabilitas berupa situasi sebelum bencana, saat bencana, *early recovery*, dan rehabilitasi. Akan tetapi, dalam penelitian ini terdapat pada kegiatan yang bersifat preventif walaupun terdapat juga beberapa realisasi kegiatan yang bersifat kuratif. Adanya keikutsertaan penyandang disabilitas pada manajemen bencana, khususnya dalam situasi sebelum bencana atau kesiapsiagaan, dapat mengurangi dampak akibat kerentanan mereka serta meningkatkan kapasitas terutama membantu di situasi kondisi saat terjadi bencana (United Nations, 2012).

Melandasi konsep tersebut, kemudian analisis data lapangan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, situasi sebelum bencana. Telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa program kegiatan yang berisikan tentang pendidikan dan pelatihan yang dilakukan ASB dengan BPBD Jawa Tengah dan para penyandang disabilitas terkait PRB inklusif pada tahun 2015 hingga 2018. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan *transfer knowledge* terkait PRB inklusif agar dapat meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan mereka untuk mengurangi dampak akibat bencana. Para penyandang disabilitas yang terlatih diharapkan mampu memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan sebagai peserta, pelatih, fasilitator, narasumber, maupun perencanaan dokumen yang dikembangkan oleh BPBD salah satu contohnya seperti rencana kontijensi penanggulangan bencana yang berbasis inklusif.

Kedua, early recovery. Berdasarkan data lapangan yang telah diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Endah Susilawati, terdapat kasus bencana alam puting beliung yang terjadi di Desa Kandang Mas, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus pada tahun 2019 dan bencana banjir di Dewasa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pada tahun 2021. Dalam situasi bencana tersebut, adanya keikutsertaan penyandang disabilitas yang membantu BPBD Kabupaten Kudus di bagian dapur umum. Mereka para penyandang disabilitas bertugas dalam bidang pengemasan kebutuhan pangan kemudian mendistribusikan kepada korban yang terdampak bencana alam. Hal tersebut mencerminkan bahwa para penyandang disabilitas mengimplementasikan pendidikan dan pelatihan yang mereka lakukan sebelumnya. *Ketiga*, rehabilitasi dan rekonstruksi. Para penyandang disabilitas membantu saat pasca bencana dengan cara menenangkan untuk mengurangi rasa trauma dan melakukan komunikasi kepada para korban yang terdampak bencana alam.

2) BPBD Jawa Tengah

Beberapa program dan kegiatan yang telah dilakukan antara BPBD Jawa Tengah dan ASB tentunya berdampak pada peningkatan kapasitas dalam bidang PRB inklusif. Menurut ACBF (dalam Fauzi, 2016:65), peningkatan kapasitas merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan baik dari individu hingga komunitas dalam mengidentifikasi permasalahan dan memanfaatkan peluang untuk mengatasi masalah tersebut. Sesuai dengan konsep yang diambil dari Warsito (dalam Dwihastari, 2017:4), terdapat 5 faktor yang mempengaruhi antara lain komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Mendasarkan konsep ini, maka analisis data lapangan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Komitmen bersama. Data lapangan yang diperoleh menunjukkan bahwa adanya kesepakatan bersama kerjasama dalam antara BPBD Jawa Tengah dan ASB untuk meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas pada bidang PRB inklusif. Komitmen bersama ini juga dibuktikan dengan adanya kesepakatan kerjasama yang dibentuk dan disahkan melalui MoU yang kemudian dilanjutkan dengan rangkaian proses kegiatan.

Kedua, kepemimpinan. Menurut data yang diperoleh, BPBD Jawa Tengah memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk menjadi tonggak inisiasi dengan tujuan menyukseskan program dalam pembangunan kapasitas yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa program kegiatan dan pelatihan gabungan yang dilakukan antara penyandang disabilitas yang sudah terlatih dan BPBD Jawa Tengah yang dijembatani oleh

ASB. Pada program kegiatan tersebut, penyandang disabilitas yang terpilih menjadi fasilitator dalam beberapa sesi kegiatan untuk memberikan aspirasi dan masukan yang relevan dalam meningkatkan kapasitas PRB inklusif di Provinsi Jawa Tengah.

Ketiga, reformasi peraturan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa adanya amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, akan tetapi masih belum direalisasikan. Dalam hal ini, ASB berperan untuk memastikan inklusi sudah diintegrasikan ke dalam pengembangan kebijakan serta peraturan lokal. Oleh karenanya, kerjasama dalam peningkatan kapasitas ini membuahkan hasil dengan disahkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pada dasarnya, peraturan tersebut menjelaskan bahwa perlunya keikutsertaan dan partisipasi aktif dari penyandang disabilitas dalam bidang penanggulangan bencana, pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas dalam bencana, serta perlu adanya pembentukan unit layanan disabilitas dalam penanggulangan bencana. Penyandang disabilitas juga ikut andil dalam memberikan masukan dan saran yang relevan di peraturan tersebut. Hal ini menjadikan bukti bahwa dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan, diharapkan dapat meningkatkan pengembangan kapasitas terkait PRB inklusif.

Keempat, reformasi kelembagaan. Berdasarkan hasil lapangan yang diperoleh, terdapat dua temuan dari peningkatan kapasitas dalam bidang PRB inklusif, yaitu:

- 1) Terbentuknya Unit LIDis PB di Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah naungan BPBD Jawa Tengah. Unit ini dibentuk pada tahun 2016 melalui program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan ASB kepada BPBD Jawa Tengah sudah penyandang disabilitas terpilih. Seiring berjalannya waktu, Unit LIDis diresmikan pada bulan Juli tahun 2017 dengan mengundang seluruh BPBD Kabupaten yang berada di dalam Provinsi Jawa Tengah dengan bantuan mitra konsorsium TATTs termasuk ASB. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Edy, mengatakan bahwa Unit LIDis Provinsi Jawa Tengah meraih prestasi sebagai unit kelembagaan pertama di Indonesia dalam melaksanakan dan mengimplementasikan hak penyandang disabilitas dalam bidang penanggulangan bencana. Pembentukan Unit LIDis ini melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti staff dari BPBD Jawa Tengah, OPDis, dan organisasi kebencanaan lainnya dalam struktur organisasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan Unit LIDis dalam penanggulangan bencana. Unit ini memiliki tujuan melakukan kerjasama dengan beberapa pemangku kepentingan untuk memberikan layanan pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah. Setelah kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas, BPBD Jawa Tengah bersama dengan anggota Unit LIDis mentrasfer kapasitas PRB inklusif ke beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Seiring berjalannya penelitian ini, terdapat beberapa Unit LIDis yang sudah diresmikan antara lain Kabupaten Jepara, Kudus, Wonogiri, Magelang, Rembang, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Temanggung, Sukoharjo, dan Pekalongan.

- 2) BPBD mempekerjakan salah satu penyandang disabilitas terpilih dan diberikan kedudukan sebagai staff *Outsourcing* di BPBD Jawa Tengah, yakni Ibu Endah Susilawati dengan tujuan menjadi narahubung antara BPBD Jawa Tengah dengan Unit LIDis Provinsi Jawa Tengah serta penguatan sumber daya pendukung dalam bidang PRB inklusif bagi para penyandang disabilitas. Selain menjadi narahubung, hal ini juga merupakan realisasi dari kerjasama untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas untuk ikut andil dalam penanggulangan bencana yang inklusif.

Kelima, kekuatan dan kelemahan. Menganalisis mengenai kekuatan, telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh ASB untuk mendukung peningkatan kapasitas antara BPBD Jawa Tengah dan para penyandang disabilitas. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa ASB dalam melakukan perannya memberikan *insight* melalui kerjasama dengan proses kegiatan program pendidikan dan pelatihan, kemudian diaktualisasikan yang mana penyandang disabilitas dan BPBD Jawa Tengah bekerjasama dalam penanggulangan bencana membuahkan hasil dan menjadi berkapasitas. Sebelumnya, adanya kelemahan yang mana belum adanya *insight* terkait PRB inklusif pada pemangku kepentingan yang terkait.

Dari Kerentanan Menuju Berkapasitas

Setelah dijelaskan mengenai analisis pada faktor peningkatan kapasitas dalam PRB, terdapat dampak yang diperoleh baik sebelum dan sesudah antara BPBD Jawa Tengah dan Penyandang disabilitas yang akan dirangkum pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas dan BPBD Jawa Tengah dalam PRB Inklusif

No.	Sebelum	Sesudah
1.	Kurangnya pengetahuan terkait PRB inklusif bagi penyandang disabilitas dan BPBD	Adanya wawasan dan insight dari ASB mengenai PRB inklusif.
2.	Kurang dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas	Pemenuhan hak penyandang disabilitas.
3.	Implementasi Perda yang masih lemah	Lahirnya kebijakan baru untuk mendukung implementasi Perda.
4.	Belum terdapat partisipasi penyandang disabilitas	Peran ASB menghasilkan partisipasi penyandang disabilitas dalam PRB inklusif.
5.	Belum adanya kesinambungan penyandang disabilitas dan BPBD	ASB yang menjadi jembatan penghubung yang menciptakan sinergitas antara penyandang disabilitas dan BPBD Jawa Tengah.

Sumber: Hasil Olah Data dari Hasil Wawancara di Lapangan dengan Narasumber, 2022

Berdasarkan hasil perbandingan tabel di atas, hal ini membuktikan bahwa peran ASB dalam mengaktualisasikan PRB guna meningkatkan kapasitas BPBD Jawa Tengah dan

partisipasi penyandang disabilitas. Terdapat perubahan yang terjadi antara penyandang disabilitas dan BPBD Jawa Tengah pada sebelum dan sesudah setelah mendapatkan *insight* melalui kerjasama internasional yang dilakukan dengan ASB.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah tingkat kejadian bencana tinggi dan menempati posisi pertama dalam bencana alam di Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia telah ikut andil dalam ratifikasi perjanjian internasional Sendai Framework Action 2015-2030 dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Internasional tahun 2006 yang diterapkan pada Perka BNPB No. 14 tahun 2014 dan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 11 tahun 2014. Implementasi yang masih lemah melatarbelakangi adanya kerjasama internasional yang dilakukan *sub-government* dengan INGO. Pemerintah Jawa Tengah menunjuk BPBD Jawa Tengah dalam melakukan kerjasama dengan ASB sebagai INGO di bidang bantuan kemanusiaan inklusif dengan salah satu fokus pengurangan risiko bencana inklusif. Melandasi beberapa konsep yang digabungkan dan telah disesuaikan, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa peran ASB melalui berbagai program, kegiatan, serta aktualisasi melahirkan adanya *insight* dan peningkatan kapasitas baik bagi penyandang disabilitas dan lembaga terkait. Dampak yang dihasilkan berupa perubahan dari yang awalnya kondisi rentan menjadi berkapasitas. Jika penelitian ini melihat upaya INGO melalui kerjasama dalam bidang pengurangan risiko bencana inklusif dengan mengikutsertakan penyandang disabilitas terpilih yang sudah diberikan peningkatan kapasitas, maka saran untuk penelitian selanjutnya yang merujuk pada pemangku kebijakan dapat berupa pengkajian peraturan daerah untuk menerapkan penginklufitan agar pemerataan pengurangan risiko bencana inklusif di Indonesia dapat berjalan dengan baik secara berkepanjangan. Di sisi lain, penelitian ini memberikan saran bagi para akademisi untuk meneliti bagaimana kaum penyandang disabilitas setelah diberikan peningkatan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana inklusif untuk kedepannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Dra. Rr. Hermi Susiatiningsih, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1, Bapak Muhammad Faizal Alfian, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing 2 dan Mba Anjani Tri Fatharini, S.IP., M.A. selaku Dosen Penguji yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademik dengan pelayanan yang ramah dan membantu Penulis dalam proses penulisan jurnal penelitian.

REFERENSI

- Arbeiter Samariter Bund. (2018). *ASB in the TATTs Program of Inclusive Disaster Risk Reduction in the Province of Central Java*.
- Arbeiter Samariter Bund. (2020). *ASB IN SOUTH EAST EUROPE*. <https://asb-see.org/asb-in-south-east-europe/>.
- Ayu Rizaty, M. (2021). *Jawa Tengah Jadi Provinsi Paling Banyak Dilanda Bencana Alam*

- / *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/09/jawa-tengah-jadi-provinsi-paling-banyak-dilanda-bencana-alam>.
- Banyaneer. (2012). *Disability-Inclusive Disaster Risk Management: A Toolkit for Practice in South Asia*, Handicap International. www.banyaneer.com.
- Dwihastari, S. (2017). *Analisa Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang*.
- Farabi, N., & Susiatiningsih, H. (2016). *Communication Strategies of DFTW (Domes for The World) in Post-Earthquake Reconstruction and Rehabilitation in Yogyakarta, Indonesia. January 2016*. <https://doi.org/10.2991/icpm-16.2016.36>
- Fauzi, L. M. (2016). *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dalam Proses Masyarakat Ekonomi ASEAN. VI(2)*, 63–70.
- Holsti, K. . (1988). *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis Jilid 2 / K.J. Holsti; alih bahasa M. Tahir Azhary (Ed. IV)*. Erlangga.
- Johnson, K. (2017). *Why Disability Inclusion Matters in Disaster Risk Reduction*. <https://www.preventionweb.net/blog/why-disability-inclusion-matters-disaster-risk-reduction>.
- MD, M., & Anwari, W. (2002). *Reformasi politik dan kekuatan masyarakat kendala dan peluang menuju demokrasi*. Jakarta Pustaka LP3ES. <https://pustakaaceh.perpusnas.go.id/detail-opac?id=28399>.
- Nugroho, A. A. (2022, Juni 6). (M. J. Rachmaditya, Pewawancara). Bertempat di gedung BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- Pertiwi, P., Llewellyn, G., & Villeneuve, M. (2019). People with disabilities as key actors in community-based disaster risk reduction. *Disability and Society*, *34*(9–10), 1419–1444. <https://doi.org/10.1080/09687599.2019.1584092>.
- Pertiwi, P., Llewellyn, G., & Villeneuve, M. (2020). Disability representation in Indonesian disaster risk reduction regulatory frameworks. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, *45*(December 2019), 101454. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101454>.
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT Remaja Rosdakarya.
- Priestley, M., & MA, L. H. (2008). Disability and Disaster Recovery. *Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation*, *February 2014*, 37–41. <https://doi.org/10.1300/J198v05n03>.
- Prasetya, A. A. (2022, Juni 3). (M. J. Rachmaditya, Pewawancara). Melalui media Zoom Meeting

- Rizki, A., Putera, R. E., & Azre, I. A. (2020). Kapasitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Penanggulangan Bencana Gempa dan Tsunami. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, April, 51–72. <https://doi.org/10.33701/jtp.v12i1.838>.
- Rudy, T. M. (2016). *Organisasi dan Administrasi Internasional* (3rd ed.). Refika Aditama.
- Santoso, A. D., Noor, I., & Ulum, M. C. (2013). Disabilitas dan Bencana (Studi tentang Agenda Setting Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia). *Adiministrasi Publik*, 3(12), 2033–2039.
- Sarwono, S. A. (2022, Juni 6). (M. J. Rachmaditya, Pewawancara). Bertempat di gedung BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- Supriyanto, E. (2022, Juli 15). (M. J. Rachmaditya, Pewawancara). Melalui media Zoom Meeting.
- Susilawati, E. (2022, Juli 8). (M. J. Rachmaditya, Pewawancara). Bertempat di gedung BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- United Nations. (2012). *Disability, Natural Disasters, and Emergency Situations*. www.un.org/disabilities/default.asp?id=1546.
- Widagdo, A. (2022, Juni 6). (M. J. Rachmaditya, Pewawancara). Bertempat di gedung BPBD Provinsi Jawa Tengah.
- Widiastutik, R. (2021, Juli 16). (M. J. Rachmaditya, Pewawancara). Melalui media Sosial.
- Zakaria, K. (2022, Agustus 16). (M. J. Rachmaditya, Pewawancara). Bertempat di gedung BPBD Provinsi Jawa Tengah.